



LAPORAN KEUANGAN

PT Ngawi Kertosono Jaya

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

PT NGAWI KERTOSONO JAYA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Iwan Moedyarno
Alamat : Jalan Borobudur Nomor 20
Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo
Kota Madiun, Jawa Timur, Indonesia 63122
No. Telepon : (0351) 4775 555, (0351) 4772 200
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Mei Prabowo
Alamat : Jalan Borobudur Nomor 20
Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo
Kota Madiun, Jawa Timur, Indonesia 63122
No. Telepon : (0351) 4775 555, (0351) 4772 200
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Ngawi Kertosono Jaya;
2. Laporan keuangan PT Ngawi Kertosono Jaya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Ngawi Kertosono Jaya dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Ngawi Kertosono Jaya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Ngawi Kertosono Jaya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Januari 2017

Direktur Utama

Direktur

Iwan Moedyarno

Mei Prabowo



**PT NGAWI KERTOSONO JAYA
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1-2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	3
Laporan Perubahan Ekuitas.....	4
Laporan Arus Kas.....	5
Catatan Atas Laporan Keuangan.....	6-31



Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel: +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 6100
ey.com/id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-3085/PSS/2017

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Ngawi Kertosono Jaya**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Ngawi Kertosono Jaya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-3085/PSS/2017 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Ngawi Kertosono Jaya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Purwantono, Sungkoro & Surja

E. Batara Manurung, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0693

27 Januari 2017

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2016
(Disajikan dalam rupiah)

	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2c,2h,4,14,22	132.354.922.012	13.994.960.962
Piutang kepada pemerintah	2h,2i,2j,5,14,22	152.912.677.893	-
Piutang dari pemegang saham	2h,2i,14,22	-	7.247.046.142
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	2h	259.855.296	236.889.445
Aset lancar lainnya	2h,22	174.385.128	139.259.690
TOTAL ASET LANCAR		285.701.840.329	21.618.156.239
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka kontraktor dan konsultan	2i,6,14	186.447.537.628	300.463.004.800
Dana ditetapkan penggunaannya	2h,2i,7,14,22	38.319.462.100	38.319.462.100
Aset takberwujud	2d,2e,8	1.716.487.234.104	183.853.831.975
Nilai tambah ditangguhkan	2h,2i,2j,14,22	15.542.396	-
Aset tetap		59.057.503	82.270.556
Aset tidak lancar lainnya	9	41.037.212.444	-
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		1.982.366.046.175	522.718.569.431
TOTAL ASET		2.268.067.886.504	544.336.725.670

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2016
(Disajikan dalam rupiah)

	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang kontraktor & konsultan	10,14,22	77.200.526.105	-
Beban akrual	2h,2i,11,14,22	736.847.568.971	107.831.724.529
Utang kepada pemegang saham	2h,2i,2j,12,14,22	208.740.089.307	-
Utang pajak	2f,13a	6.195.842.876	8.300.143.172
Pinjaman jangka pendek	2h,14,15,22	-	212.842.306.499
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		1.028.984.027.259	328.974.174.200
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang retensi	2h,2i,14,16,22	34.586.544.623	-
Utang bank	2h,2i,14,17,22	725.319.059.142	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		759.905.603.765	-
TOTAL LIABILITAS		1.788.889.631.024	328.974.174.200
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar - 48.473.308 saham			
nilai nominal Rp22.000 per saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh -			
21.370.615 saham pada tanggal			
31 Desember 2016 dan 3.622.727			
saham pada tanggal 31 Desember 2015	18	470.153.530.000	79.699.994.000
Uang muka setoran modal	19	-	138.589.000.000
Saldo laba (defisit)		9.024.725.480	(2.926.442.530)
TOTAL EKUITAS		479.178.255.480	215.362.551.470
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		2.268.067.886.504	544.336.725.670

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam rupiah)

	Catatan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2016	2015
PENDAPATAN KONSTRUKSI	2g	1.532.636.411.727	114.001.385.597
BEBAN KONSTRUKSI	2g	(1.516.813.042.100)	(112.824.624.761)
LABA KOTOR		15.823.369.627	1.176.760.836
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	2g,20	(8.497.509.324)	(2.120.467.115)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Penghasilan keuangan		5.781.634.633	1.900.228.261
Pajak final atas pendapatan bunga		(1.156.326.926)	(380.045.652)
Kerugian kurs, bersih		-	(1.434.994.246)
Lain-lain		-	(49.770.941)
PENGHASILAN LAIN-LAIN, BERSIH		4.625.307.707	35.417.422
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		11.951.168.010	(908.288.857)
Beban pajak	13	-	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		11.951.168.010	(908.288.857)
Penghasilan komprehensif lain		-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		11.951.168.010	(908.288.857)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam rupiah)

	Catatan	Modal disetor	Uang muka setoran modal	Saldo laba (defisit)	Total ekuitas
Saldo tanggal 1 Januari 2015		60.682.390	43.320.337.040	(2.018.153.673)	41.362.865.757
Reklasifikasi uang muka setoran modal menjadi modal saham	19	43.320.337.040	(43.320.337.040)	-	-
Penambahan uang muka setoran modal	19	-	138.589.000.000	-	138.589.000.000
Tambahan modal saham	18	36.316.974.570	-	-	36.316.974.570
Rugi tahun berjalan		-	-	(908.288.857)	(908.288.857)
Saldo tanggal 31 Desember 2015		79.699.994.000	138.589.000.000	(2.926.442.530)	215.362.551.470
Reklasifikasi uang muka setoran modal menjadi modal saham	19	138.589.000.000	(138.589.000.000)	-	-
Tambahan modal saham	18	251.864.536.000	-	-	251.864.536.000
Laba tahun berjalan		-	-	11.951.168.010	11.951.168.010
Saldo tanggal 31 Desember 2016		470.153.530.000	-	9.024.725.480	479.178.255.480

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam rupiah)

		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	Catatan	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan, dan untuk beban operasi lainnya		(13.156.883.080)	(4.567.665.006)
Penerimaan atas penghasilan keuangan		4.590.182.257	1.380.922.919
Pembayaran bunga		(5.588.610.075)	-
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		(14.155.310.898)	(3.186.742.087)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pembayaran atas penambahan aset takberwujud	8,24	(753.955.811.373)	(11.708.612.090)
Pembayaran dana talangan kepada pemilik lahan	5	(151.934.229.320)	-
Penerimaan (pembayaran) uang muka kontraktor dan konsultan	6	114.015.467.172	(300.463.004.800)
Penempatan dana ditetapkan penggunaannya	7	-	(38.319.462.100)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(791.874.573.521)	(350.491.078.990)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan (pembayaran) pinjaman jangka pendek	15	(212.842.306.499)	213.327.140.910
Penerimaan utang bank	17	720.608.422.378	-
Peningkatan modal saham	18	251.864.536.000	38.484.991.422
Penerimaan dari (pembayaran kepada) pemegang saham	12	191.517.878.590	(22.871.528.935)
Pembayaran biaya perolehan atas fasilitas utang bank		(26.758.685.000)	-
Penerimaan dari uang muka setoran modal	19	-	138.589.000.000
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan		924.389.845.469	367.529.603.397
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	4	118.359.961.050	13.851.782.320
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4	13.994.960.962	143.178.642
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		132.354.922.012	13.994.960.962

Informasi tambahan atas aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 24.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

1. UMUM

PT Ngawi Kertosono Jaya ("Perusahaan") didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Sugito Tedjamulja, S.H. No. 60 tanggal 24 Maret 2009. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17226.AH.01.01.TH.2009 tanggal 30 April 2009.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perusahaan beroperasi dalam konsesi untuk proyek jalan tol Ngawi - Kertosono ("Proyek"). Berdasarkan Pasal 3, maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan konsesi proyek Jalan Tol Ngawi-Kertosono, bagian dari Jalan Tol Trans Jawa, meliputi kegiatan pendanaan, perancangan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan bagian dari Jalan Tol Ngawi-Kertosono.
2. Melaksanakan kegiatan investasi dan jasa penunjang dalam pembangunan Jalan Tol Ngawi-Kertosono sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan pekerjaan perencanaan, termasuk dalam meminjam dan meminjamkan uang;
- Membangun jalan dan jembatan, bangunan pelengkap, peralatan jalan, serta sarana untuk ruas Jalan Tol Ngawi-Kertosono dan peralatan lainnya;
- Mengoperasikan dan memelihara Jalan Tol Ngawi-Kertosono;
- Memungut dan menggunakan tarif Jalan Tol Ngawi-Kertosono dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menggunakan bagian lain dari lokasi Jalan tol Ngawi Kertosono untuk kegiatan lain dalam pengoperasian Jalan Tol Ngawi-Kertosono sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan persetujuan dari lembaga pemerintah terkait;
- Melakukan upaya dalam bidang lain yang berkaitan dengan pengusahaan jalan tol dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Perusahaan berdomisili di Jalan Borobudur No. 20, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Induk Perusahaan adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang berdomisili di Jakarta, Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Achiran Pandu Djajanto	Direktur Utama	: Iwan Moedyarno
Komisaris	: Munib Lusianto	Direktur	: Yudhi Dharmawan Mei Prabowo

Pada tanggal 31 Desember 2016 selain Direksi dan Komisaris, Perusahaan memiliki 39 karyawan yang terdiri dari 12 karyawan yang diperbantukan dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan 3 karyawan yang diperbantukan dari PT Waskita Toll Road serta 24 karyawan kontrak (tidak diaudit). Pada tanggal 31 Desember 2015 selain Direksi dan Komisaris, Perusahaan tidak memiliki karyawan tetap.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") dari Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI").

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun berdasarkan PSAK No. 1 (2013) "Penyajian Laporan Keuangan", dalam penyusunan laporan keuangannya.

Laporan keuangan ini disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas yang disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank serta deposito berjangka dengan waktu jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dan tidak dijaminkan.

d. Aset Takberwujud

Berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ("PPJT"), Perusahaan memiliki Hak Pengusahaan Jalan Tol ("HPJT") yang merupakan hak untuk membebankan pengguna jasa publik berdasarkan perjanjian jasa konsesi (Catatan 21a).

Perusahaan telah menerapkan ISAK No. 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" ("ISAK No. 16") dan ISAK No. 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" ("ISAK No. 22").

ISAK No. 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK No. 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK No. 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset Takberwujud (lanjutan)

Perusahaan membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak perusahaan jalan tol yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian ruas jalan tol. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") tanpa syarat.

Perusahaan tidak dapat memindahkan/mengalihkan haknya berdasarkan PPJT, dan tidak dapat memindahkan/mengalihkan tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan PPJT tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemerintah, kecuali pengalihan dilakukan sebagai bentuk jaminan untuk pembayaran pinjaman.

Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/BPJT pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selama periode hak perusahaan jalan tol, aset hak perusahaan jalan tol dapat dikeluarkan dari laporan posisi keuangan Perusahaan jika jalan tol diserahkan (dikuasakan) kepada pihak lain atau Pemerintah/BPJT mengubah status jalan tol menjadi jalan non-tol atau tidak ada manfaat ekonomi yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Selain itu, Perusahaan mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK No. 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" dan PSAK No. 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Perusahaan menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Perusahaan diakui pada nilai wajar.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan jalan tol atau peningkatan kapasitas jalan tol yang meliputi pengadaan tanah, studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan jalan tol, termasuk biaya pembangunan jalan akses ke jalan tol, jalan alternatif dan fasilitas jalan umum yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman lain yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut telah selesai dan aset konsesi telah siap untuk dioperasikan.

Perusahaan mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset tak berwujud dimana Perusahaan menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Perusahaan mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset Takberwujud (lanjutan)

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasi (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasi dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasi sesuai maksud penggunaannya selesai secara substansial.

e. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 48 (2014), "Penurunan Nilai Aset" dalam penyusunan laporan keuangannya.

Perusahaan menilai pada setiap periode pelaporan tahunan indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas atau aset takberwujud yang belum dapat digunakan) diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan atas aset tersebut, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 19 (Revisi 2010), "Aset TakBerwujud".

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "rugi penurunan nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, model penilaian yang sesuai digunakan untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda (*valuation multiples*) atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset yang mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa masa manfaatnya.

f. Pajak Penghasilan

Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan".

Pajak penghasilan non-final - pajak kini

Aset dan liabilitas pajak penghasilan kini untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya diukur pada jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak penghasilan final

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Beban pajak kini sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan yang diakui pada tahun berjalan untuk tujuan akuntansi.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak penghasilan final pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada akhir tahun pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat penghasilan kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan dapat digunakan.

Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar penghasilan kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan mengakui pendapatan sesuai periode yang sudah berjalan dalam tahun yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam PSAK No. 23, "Pendapatan", kecuali pendapatan konstruksi yang juga mengacu kepada ISAK No. 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" dan PSAK No. 34, "Kontrak Konstruksi".

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*), kecuali beban konstruksi yang juga mengacu kepada ISAK No. 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" dan PSAK No. 34, "Kontrak Konstruksi".

h. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK No. 60 (2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" dan PSAK No. 68 (2013), "Pengukuran Nilai Wajar". Penerapan PSAK revisi ini tidak memiliki dampak yang signifikan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan.

1. Aset keuangan

• **Pengakuan awal**

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian tersebut pada setiap akhir periode buku.

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2016, aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan setara kas, piutang kepada Pemerintah, piutang dari pemegang saham, nilai tambah ditangguhkan, dana ditetapkan penggunaannya dan aset lancar lainnya. Perusahaan telah menetapkan bahwa semua aset keuangan dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, aset keuangan tersedia untuk dijual dan investasi dimiliki hingga jatuh tempo.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

- Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

2. Liabilitas keuangan

- Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman dan utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2016, liabilitas keuangan Perusahaan termasuk beban akrual, utang kepada pemegang saham, utang retensi, pinjaman jangka pendek dan utang bank. Perusahaan telah menetapkan bahwa semua liabilitas keuangan dikategorikan sebagai pinjaman dan utang. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, liabilitas keuangan tersedia untuk dijual dan investasi dimiliki hingga jatuh tempo.

- Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

3. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

Risiko penyesuaian kredit

Perusahaan menyesuaikan harga di pasar yang lebih dapat diobservasi untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak yang bertransaksi antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen ikut diperhitungkan.

5. Biaya perolehan diamortisasi atas instrumen keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

6. Penurunan nilai dari aset keuangan

Perusahaan melakukan evaluasi pada setiap tanggal laporan posisi keuangan apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

- **Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi**

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan kelompok tersebut dinilai penurunan nilainya secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

6. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Nilai tercatat aset keuangan tersebut berkurang melalui penggunaan nilai penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan penyisihan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistis dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Perusahaan. Jika, pada periode berikutnya, jumlah taksiran kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan untuk penurunan nilai. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam laba rugi.

7. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

- Aset keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam suatu perjanjian "*pass-through*"; dan baik (a) Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan secara substansial tidak mentransfer atau tidak menahan seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

- Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laba rugi.

i. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usaha normalnya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan dengan pihak-pihak berelasi". Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan syarat dan kondisi normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

Perusahaan mengungkapkan pihak berelasi sebagai berikut:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor,
 - (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, atau
 - (iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain),
 - (ii) Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini didefinisikan dalam ruang lingkup Kementerian Keuangan atau Pemerintah yang merupakan entitas berelasi.

j. Dana Talangan

Perusahaan mencatat dan mengukur Uang Dana Talangan sebagaimana liabilitas keuangan diatur dalam PSAK No. 50 (2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK No. 60 (2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" dan PSAK No. 68 (2013), "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2h).

Perusahaan mencatat Dana Talangan yang diterima dari pemegang saham sebagai "Dana Ditetapkan Penggunaannya" sebelum dana tersebut dibayarkan kepada pemilik lahan. Perusahaan mereklasifikasi sebagian/seluruh "Dana Ditetapkan Penggunaannya" sebagai "Piutang kepada Pemerintah" pada saat Perusahaan telah membayarkan sebagian/seluruh Dana Talangan kepada pemilik lahan.

Perusahaan mencatat Nilai Tambah yang timbul sehubungan dengan Uang Dana Talangan sebagai "Nilai Tambah Ditangguhkan" sebelum Uang Dana Talangan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Atas Uang Dana Talangan yang telah digunakan sesuai dengan peruntukannya, Perusahaan mereklasifikasi sebagian Nilai Tambah yang timbul sehubungan dengan Uang Dana Talangan yang telah digunakan sesuai dengan peruntukannya menjadi "Piutang kepada Pemerintah" (Catatan 21h) dan mengkapitalisasi sisanya sebagai "Aset Takberwujud".

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi, yang mempengaruhi jumlah penghasilan, beban-beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian atas asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat saja berakibat terhadap perlunya penyesuaian material atas nilai tercatat aset atau liabilitas yang terpengaruh di masa mendatang.

a. Pertimbangan

Pertimbangan dibuat oleh manajemen dalam rangka proses penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2h.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari Perusahaan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana Perusahaan beroperasi. Pertimbangan Perusahaan adalah mata uang fungsional yang merupakan mata uang paling berpengaruh terhadap posisi keuangan dan hasil usaha operasi Perusahaan.

Pengakuan dan pengukuran Aset Takberwujud

Perusahaan mengakui aset takberwujud sejauh Perusahaan memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada Perusahaan akan ditentukan dengan mengacu pada syarat kontrak dan, jika ada, hukum kontrak yang relevan.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi-asumsi utama terkait ketidakpastian masa depan dan sumber utama estimasi lainnya pada tanggal laporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode keuangan mendatang diuraikan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi-asumsi dan estimasinya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada terkait dengan perkembangan masa depan dapat berubah dikarenakan perubahan pasar atau keadaan yang timbul di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi-asumsi ketika terjadi.

Estimasi Marjin Konstruksi

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku mensyaratkan pendapatan konstruksi diakui sebesar nilai wajarnya. Perusahaan menentukan profit atau marjin konstruksi dalam menghitung nilai wajar pendapatan konstruksi tersebut berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang dihitung dengan model tertentu.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar dari Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian, termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan. Rincian lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 22.

4. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Kas	8.282.629	25.533.834
Kas di bank		
Pihak berelasi		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	62.210.599.066	11.469.427.128
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	33.741.856.711	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.394.183.606	-
Deposito berjangka		
Pihak berelasi - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	30.000.000.000	-
Pihak ketiga - PT Bank Bukopin Tbk	5.000.000.000	2.500.000.000
Total kas dan setara kas	132.354.922.012	13.994.960.962

Tingkat bunga deposito pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah 7%-8% per tahun, sedangkan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah 9,25%.

5. PIUTANG KEPADA PEMERINTAH

Piutang kepada Pemerintah terdiri dari Dana Talangan Tanah dan Nilai Tambah atas Dana Talangan Tanah yang telah dibayarkan oleh Perusahaan kepada pemilik lahan, dan akan diganti oleh Pemerintah sesuai dengan Amandemen PPJT terkait (Catatan 21a), dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Dana Talangan	151.934.229.320	-
Nilai Tambah Dana Talangan	978.448.573	-
Total	152.912.677.893	-

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

6. UANG MUKA KONTRAKTOR DAN KONSULTAN

Akun ini terdiri dari uang muka kepada:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Kontraktor dan konsultan:		
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	102.828.848.346	148.300.621.600
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	79.235.877.648	146.784.700.000
PT Multi Phi Beta	1.904.232.069	2.055.659.000
PT Eskapindo Matra	1.598.540.267	2.074.369.000
PT Buana Archicon	880.039.298	1.247.655.200
Total	186.447.537.628	300.463.004.800

7. DANA DITETAPKAN PENGGUNAANNYA

Pada tanggal 10 Juli 2015, Perusahaan menempatkan garansi bank dalam bentuk deposito berjangka di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp38.319.462.100 sebagai jaminan pelaksanaan pengusahaan jalan tol berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ("PPJT") ruas Ngawi-Kertosono antara Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") dan Perusahaan. Berdasarkan PPJT, jaminan pelaksanaan tersebut berlaku sejak tanggal penempatan sampai dengan dua belas bulan setelah tanggal perkiraan selesainya konstruksi jalan tol. Manajemen Perusahaan mengestimasi bahwa konstruksi jalan tol akan selesai pada akhir tahun 2017. Garansi bank tersebut berlaku hingga tanggal 10 Juli 2017 dan akan diperpanjang setiap tahun sampai dengan jangka waktu yang disyaratkan di dalam PPJT. Deposito berjangka tersebut menghasilkan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 7,25% pada tahun 2016.

8. ASET TAKBERWUJUD

Saldo aset takberwujud dari proyek konsesi sebesar Rp1.716.487.234.104 dan Rp183.853.831.975 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015. Akun ini terdiri dari biaya konstruksi, biaya perencanaan dan biaya pengembangan yang terjadi dan dapat diatribusikan secara langsung terhadap proyek konsesi tersebut.

9. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Saldo aset tidak lancar lainnya secara signifikan terkait dengan biaya perolehan fasilitas pinjaman utang bank sindikasi (Catatan 17). Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo nilai biaya perolehan fasilitas pinjaman yang belum terpakai adalah sebesar Rp41.037.212.444.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

10. UTANG KONTRAKTOR DAN KONSULTAN

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor, konsultan, dan rekanan sehubungan dengan pembangunan jalan.

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pihak berelasi		
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	65.359.269.889	-
Pihak Ketiga		
PT Eskapindo Matra	4.689.940.872	-
PT Multi Phi Beta	3.497.899.525	-
PT Buana Archicon	2.494.936.103	-
PT Anugrah Bangun Kencana	1.011.641.081	-
Lain-lain	146.838.635	-
Total utang kontraktor dan konsultan	77.200.526.105	-

11. BEBAN AKRUAL

Beban akrual terdiri dari:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Kontraktor dan konsultan	708.353.031.998	104.882.941.066
Biaya perolehan fasilitas pinjaman bank sindikasi	22.710.164.089	-
Bonus	889.013.038	-
Beban bunga (Catatan 12 dan 17)	4.844.497.267	2.860.065.127
Lain-lain	50.862.579	88.718.336
Total	736.847.568.971	107.831.724.529

12. UTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM

Utang kepada pemegang saham terdiri atas utang terkait pekerjaan swakelola dan Dana Talangan Tanah. Utang swakelola merupakan utang kepada PT Waskita Toll Road terkait biaya pekerjaan awal yaitu biaya pembersihan tempat kerja yang telah dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp17.222.210.717. Pada Desember 2016, Perusahaan mendapatkan Dana Talangan Tanah dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road untuk pembayaran pengadaan tanah untuk konstruksi jalan tol (Catatan 21h). Sampai dengan 31 Desember 2016, Perusahaan telah menerima Dana Talangan Tanah sebesar Rp191.517.878.590. Berikut adalah rincian atas utang kepada pemegang saham:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Utang Swakelola:		
PT Waskita Toll Road	17.222.210.717	-
Dana Talangan Tanah:		
PT Waskita Toll Road	76.607.151.328	-
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	114.910.727.262	-
Total	208.740.089.307	-

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

13. PERPAJAKAN

a. Utang pajak:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pajak penghasilan:		
Pasal 4(2)	6.109.411.915	8.265.663.759
Pasal 21	66.949.794	31.522.013
Pasal 23	19.481.167	2.957.400
Total utang pajak	6.195.842.876	8.300.143.172

b. Rekonsiliasi laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal	
	31 Desember	
	2016	2015
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	11.951.168.010	(908.288.857)
Koreksi fiskal permanen:		
Aset takberwujud	(15.823.369.627)	(1.176.760.836)
Penghasilan yang dikenakan pajak final	(4.625.307.707)	(1.520.182.609)
Rugi fiskal	(8.497.509.324)	(3.605.232.302)
Akumulasi rugi fiskal:		
Tahun 2016	(8.497.509.324)	-
Tahun 2015	(3.605.232.302)	(3.605.232.302)
Tahun 2014	(23.173.394)	(23.173.394)
Tahun 2013	(1.420.926.764)	(1.420.926.764)
Tahun 2012	(533.835.455)	(533.835.455)
Total akumulasi rugi fiskal	(14.080.677.239)	(5.583.167.915)

c. Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan atas rugi fiskal karena manajemen berpendapat bahwa akumulasi rugi fiskal tersebut tidak akan terpulihkan sampai dengan batas waktu dari manfaat rugi fiskal.

14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Piutang dari pemegang saham

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan memiliki piutang dari pemegang saham terkait dengan pengembalian sisa saldo yang ada di rekening bank Perusahaan pada saat pengambilalihan dan pengalihan saham Perusahaan yang semula dimiliki oleh PT Thiess Contractors Indonesia ("TCI") dan PT Ferino Putra. Berdasarkan perjanjian antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Toll Road dan Perusahaan tanggal 30 Juni 2015 No 001/BA-NKJ/VI/2015, sisa saldo yang ada di rekening Perusahaan sebesar Rp7.247.046.142 dikembalikan terlebih dahulu oleh Perusahaan dan nantinya akan dilunasi oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road (para pemegang saham baru) dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal perjanjian. Pada tahun 2016, Perusahaan sudah menerima pembayaran atas piutang tersebut.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Total remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp524.658.000 dan Rp1.802.448.000.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
Pemerintah	Entitas Berelasi	Piutang kepada Pemerintah
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pemegang Saham	Penyetoran Modal Saham Utang kepada pemegang saham Piutang dari Pemegang Saham Nilai tambah ditangguhkan Beban akrual
PT Waskita Toll Road	Pemegang Saham	Penyetoran Modal Saham Utang kepada pemegang saham Piutang dari Pemegang Saham Nilai tambah ditangguhkan Beban akrual
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BUMN	Simpanan Bank, Deposito, Dana ditetapkan penggunaannya Utang Bank Beban akrual
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BUMN	Simpanan Bank, Deposito Utang Bank Beban akrual
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BUMN	Deposito, Utang Bank Beban akrual
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk	BUMN	Utang Bank Pinjaman jangka pendek Beban akrual
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	BUMN	Uang Muka Kontraktor Utang Kontraktor Utang retensi Beban akrual
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	BUMN	Uang Muka Kontraktor Utang Kontraktor Utang retensi Beban akrual

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

15. PINJAMAN JANGKA PENDEK

Pada tanggal 30 Oktober 2015, PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") dan Perusahaan menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 42 dimana SMI bersedia memberikan pinjaman kepada Perusahaan dengan nilai maksimum sebesar Rp230.000.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,85%. Pada tanggal 13 Nopember 2015, Perusahaan menarik pinjaman sebesar Rp213.327.140.910 dimana penarikan tersebut dikenakan *up-front fee* sebesar 0,25%. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai pinjaman jangka pendek tersebut adalah sebesar Rp212.842.306.499. Pada tanggal 30 Juni 2016, Perusahaan telah melunasi seluruh nilai pinjaman ini.

16. UTANG RETENSI

Utang lain-lain merupakan utang kepada kontraktor atas pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol yang ditangguhkan pembayarannya oleh Perusahaan hingga waktu 1 tahun sejak konstruksi selesai dan disertai dengan adanya Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan. Rincian utang ini adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	20.815.301.629	-
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	13.771.242.994	-
Total	34.586.544.623	-

17. UTANG BANK

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Utang bank sindikasi		
- Kredit Investasi (KI)	720.608.422.379	-
- Kredit Investasi <i>Interest During Construction</i> (KI IDC)	12.752.744.228	-
Total utang bank sindikasi	733.361.166.607	-
Biaya perolehan pinjaman	(8.042.107.465)	-
Total utang bank	725.319.059.142	-

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 14 April 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi ("Pinjaman Sindikasi") dengan jumlah maksimal sebesar Rp3.369.158.000.000 (tiga triliun tiga ratus enam puluh sembilan milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan sifat pinjaman Aflopend (limit kredit menurun sesuai dengan angsuran yang telah dilaksanakan) dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI"), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") dimana ketiga bank tersebut bertindak sebagai Joint Mandated Lead Arranger and Bookrunners ("JMLAB") dan dengan bank partisipan diantaranya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank"), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk ("SMI"), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ("Bank Jateng"), dan PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ("BPD DIY").

Pinjaman Sindikasi terdiri dari 2 bagian, yaitu Kredit Investasi ("KI") yang ditujukan untuk keperluan investasi proyek pembangunan jalan tol ruas Ngawi - Kertosono, dan Kredit Investasi *Interest During Construction* (KI IDC) yang ditujukan untuk membiayai 70% bunga KI selama masa konstruksi termasuk masa awal operasi maksimal 6 bulan setelah operasi namun tidak melebihi masa penarikan kredit. Masa penarikan pinjaman adalah 36 bulan sejak penandatanganan Pinjaman Sindikasi termasuk masa retensi 12 bulan. Jangka waktu Pinjaman Sindikasi adalah 15 tahun termasuk *grace period* 60 bulan sejak penandatanganan Pinjaman Sindikasi.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

17. UTANG BANK (lanjutan)

Tingkat suku bunga selama masa konstruksi sebesar Average Time Deposit ("ATD") ditambah dengan margin 4,75% per tahun dan selama masa operasi sebesar ATD ditambah dengan margin 4,50% per tahun. Periode pembayaran pokok dan bunga dilakukan secara triwulan setiap tanggal 23 (23 Maret, 23 Juni, 23 September, 23 Desember).

Pinjaman Sindikasi tersebut dijamin dengan Hak Konsesi Pengusahaan Jalan, seluruh tagihan dan pendapatan operasional dan usaha-usaha lain yg berhubungan dengan pengusahaan jalan tol diikat fidusia, *Escrow Accounts* yang akan dibentuk (termasuk *Construction Account*, *Collection Account*, *Debt Service Reserve Account*, *Operational Account*, dan *Excess Cash Account*), tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, Bank Garansi, dan penggantian dana dari Pemerintah diikat fidusia dengan nilai penjaminan sebesar nilai biaya proyek. Atas agunan tersebut, dilakukan pengikatan dengan nilai penjaminan minimal sebesar *Project Cost* (Rp4.813 miliar).

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya sebagai berikut:

1. *Current ratio* tahunan minimum sebesar 1,00 ;
2. Maksimum *Debt to Equity ratio* tahunan mencerminkan rasio pembiayaan bank terhadap *self-financing* dengan komposisi 70% : 30% ;
3. Menjaga *Debt to Service Coverage Ratio* (DSCR) lebih besar dari 1,00 selama masa operasi, dan jika DSCR < dari 1,00 maka pemegang saham wajib *top up* ;
4. Menjaga ekuitas selalu positif.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan tidak dapat memenuhi salah satu pembatasan rasio keuangan, akan tetapi Perusahaan telah mendapatkan surat waiver dari para kreditur sebelum tanggal 31 Desember 2016. Saldo hutang Pinjaman Sindikasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp725.319.059.142.

18. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2016			
Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Kepemilikan Lembar Saham	Total (Rp)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	59,99999	12.822.368	282.092.096.000
PT Waskita Toll Road	40,00000	8.548.246	188.061.412.000
PT Ferino Putra	0,00001	1	22.000
Total	100,00000	21.370.615	470.153.530.000

31 Desember 2015			
Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Kepemilikan Lembar Saham	Total (Rp)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	59,99999	2.173.636	47.819.992.000
PT Waskita Toll Road	40,00000	1.449.090	31.879.980.000
PT Ferino Putra	0,00001	1	22.000
Total	100,00000	3.622.727	79.699.994.000

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 10 Oktober 2016 oleh Notaris Julius Purnawan, SH., MSi., para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal saham ditempatkan dan disetor Perusahaan yang semula Rp79.699.994.000 menjadi Rp470.153.530.000. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Nomor: AHU-AH.01.03-93052 pada tanggal 26 Oktober 2016.

19. UANG MUKA SETORAN MODAL

Perusahaan memiliki uang muka setoran modal dari masing-masing pemegang saham berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	-	83.153.400.000
PT Waskita Toll Road	-	55.435.600.000
Total	-	138.589.000.000

Pada tanggal 21 Mei 2014, para pemegang saham menyetujui untuk konversi utang Perusahaan kepada TCI sebesar Rp41.154.320.188 menjadi ekuitas. Pada tanggal yang sama, PT Ferino Putra juga menyetujui untuk menambah uang muka modal disetor sebesar Rp2.166.016.852. Jumlah seluruh penambahan modal disetor di Perusahaan adalah Rp43.320.337.040.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tanggal 7 Juli 2015, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan uang muka setoran modal sebesar Rp48.500.000.000 yang semula sebesar Rp79.699.994.000 menjadi Rp128.199.994.000.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tanggal 25 Nopember 2015, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan uang muka setoran modal sebesar Rp90.089.000.000 yang semula sebesar Rp128.199.994.000 menjadi Rp218.288.994.000.

Jumlah seluruh penambahan modal disetor di Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp138.589.000.000. Perusahaan mengkonversi uang muka setoran modal menjadi modal saham sebesar Rp138.589.000.000 berdasarkan Akta No. 22 tanggal 25 April 2016 oleh Notaris Julius Purnawan, SH., MSi, yang kemudian disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor : AHU-0009878.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016.

20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	Tahun yang berakhir pada tanggal	
	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Gaji dan tunjangan	4.946.135.809	1.249.873.998
Transportasi	1.131.782.372	206.265.900
Peresmian	807.178.292	-
Perjalanan dinas	451.670.190	69.401.902
Asuransi tenaga kerja	280.413.962	196.546.920
Jasa profesional	177.134.900	79.277.000
Rapat kerja	139.511.150	10.368.446
Lain-lain	563.682.649	308.732.949
Total	8.497.509.324	2.120.467.115

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

21. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ("PPJT")

Pada tanggal 28 Juni 2011, Perusahaan menandatangani "PPJT Ngawi - Kertosono" dengan BPJT berdasarkan akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011 dari Rina Utami Djauhari, SH, notaris di Jakarta. Berdasarkan PPJT, Perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan jalan tol yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Perusahaan diwajibkan untuk melakukan pekerjaan konstruksi sebagaimana didefinisikan dalam PPJT tersebut, sesuai dengan Rencana Teknis Akhir yang telah disetujui oleh BPJT. Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan jalan tol sesuai dengan pedoman untuk Pemeliharaan dan Standar Pelayanan Minimum yang diterbitkan oleh BPJT.

Pemerintah Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Perusahaan untuk mengumpulkan tol dari pengguna jalan tol. Tarif tol ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Perusahaan berhak untuk penyesuaian tarif tol setiap dua tahun berdasarkan inflasi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

Periode konsesi jalan tol ini berlaku selama 35 tahun terhitung setelah dikeluarkan SPMK oleh BPJT sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Penerusan Pengusahaan Jalan Tol Ruas Ngawi-Kertosono No. BA.398/BPJT/KE/HK.02.03/2011 yang tercantum dalam PPJT.

Pada 20 April 2016, Perusahaan menandatangani adendum dari PPJT yang telah di aktakan dalam Akta No. 20 dari Notaris Rina Utami Djauhari, SH dengan perubahan, di antaranya, sebagai berikut:

- (1) Penyediaan Dana Talangan Tanah oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
BUJT dengan ini setuju dan berjanji untuk menyediakan Dana Talangan Tanah dalam rangka pembiayaan Pengadaan Tanah. Jumlah Dana Talangan Tanah yang harus disediakan oleh BUIT adalah maksimum sebesar Rp182.000.000.000.
- (2) Nilai Tambah atas Dana Talangan Tanah
Atas Dana Talangan Tanah yang sudah dipakai untuk pengadaan tanah, Pemerintah wajib membayar Nilai Tambah sebesar suku bunga Bank Indonesia yang ditetapkan dan diumumkan pada situs resmi Bank Indonesia, yang terhitung sejak Dana Talangan Tanah tersebut dipakai sampai dengan tanggal Dana Talangan Tanah tersebut dikembalikan oleh Pemerintah.
- (3) Pengembalian Dana Talangan dan Nilai Tambah
Pembayaran Nilai Tambah wajib dilakukan oleh Pemerintah bersamaan dengan pengembalian Dana Talangan Tanah. Pemerintah wajib mengembalikan seluruh Dana Talangan Tanah yang telah dipakai paling lambat pada 31 Desember 2016.

Pada 19 Juli 2016, Perusahaan menandatangani adendum dari PPJT yang telah di aktakan dalam Akta No. 12 dari Notaris Rina Utami Djauhari, SH dengan perubahan, di antaranya, sebagai berikut:

- (1) Penyediaan Dana Talangan Tanah oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
BUJT dengan ini setuju dan berjanji untuk menyediakan Dana Talangan Tanah dalam rangka pembiayaan Pengadaan Tanah. Jumlah Dana Talangan Tanah yang harus disediakan oleh BUIT adalah maksimum sebesar Rp343.204.000.000.
- (2) Tata Cara Penyetoran, Pencairan dan Pengembalian Dana Talangan Tanah
Badan Usaha Jalan Tol wajib menyetorkan dana ke dalam Rekening Dana Talangan Tanah sebesar 20% dari keseluruhan Dana Talangan Tanah atau minimal sebesar permintaan dari PPK Tanah, selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal pembukaan rekening.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

21. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

b. Kontrak Jasa Pemborongan Paket 1

Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi-Kertosono Ruas Ngawi-Kertosono Paket 1 antara Perusahaan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk No. 04/SPP/NKJ/IX/2015 tanggal 9 September 2015, PT Waskita Karya (Persero) Tbk berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan jalan tol dengan nilai kontrak sebesar Rp1.483.006.216.000 (termasuk Pajak Pertambahan Nilai).

Pada tanggal 3 Desember 2015, Perusahaan telah memberikan uang muka kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebesar 10% dari nilai kontrak (Rp148.300.621.600) dan akan dikembalikan secara proporsional sebesar 15% dari nilai sertifikat pembayaran dengan mengurangkan pada setiap tagihan yang dikeluarkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Perusahaan akan memotong sebesar 5% dari setiap pembayaran atas hasil pekerjaan dalam bentuk uang retensi dan akan ditahan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara Masa Pemeliharaan Tahap I Hasil Pekerjaan.

Pada tanggal 1 Juni 2016, terdapat Addendum 1 Kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Jalan Tol Solo-Ngawi-Kertosono Ruas: Ngawi Kertosono Paket 1: Sta 90+250 s.d 110+250. Nilai kontrak yang semula sebesar Rp1.483.006.216.000 menjadi Rp1.624.443.404.000 (termasuk Pajak Pertambahan Nilai).

c. Kontrak Jasa Pemborongan Paket 2

Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi-Kertosono Ruas Ngawi-Kertosono Paket 2 antara Perusahaan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk No. 05/SPP/NKJ/IX/2015 tanggal 9 September 2015, PT Adhi Karya (Persero) Tbk berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan jalan tol dengan nilai kontrak sebesar Rp419.326.000.000 (termasuk Pajak Pertambahan Nilai).

Pada tanggal 3 Desember 2015, Perusahaan telah memberikan uang muka kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebesar 10% dari nilai kontrak (Rp41.932.600.000) dan akan dikembalikan secara proporsional sebesar 15% dari nilai sertifikat pembayaran dengan mengurangkan pada setiap tagihan yang dikeluarkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Perusahaan akan memotong sebesar 5% dari setiap pembayaran atas hasil pekerjaan dalam bentuk uang retensi dan akan ditahan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara Masa Pemeliharaan Tahap I Hasil Pekerjaan.

Pada tanggal 1 Juni 2016, terdapat Addendum 1 Kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Jalan Tol Solo-Ngawi-Kertosono Ruas: Ngawi Kertosono Paket 2: Sta 110+250 s.d 118+700. Nilai kontrak yang semula sebesar Rp419.326.000.000 menjadi Rp582.846.000.000 (termasuk Pajak Pertambahan Nilai).

d. Kontrak Jasa Pemborongan Paket 3

Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi-Kertosono Ruas Ngawi-Kertosono Paket 3 antara Perusahaan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk No. 06/SPP/NKJ/IX/2015 tanggal 9 September 2015, PT Adhi Karya (Persero) Tbk berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan jalan tol dengan nilai kontrak sebesar Rp1.048.521.000.000 (termasuk Pajak Pertambahan Nilai).

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

21. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

d. Kontrak Jasa Pemborongan Paket 3 (lanjutan)

Pada tanggal 1 Desember 2015, Perusahaan telah memberikan uang muka kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebesar 10% dari nilai kontrak (Rp104.852.100.000) dan akan dikembalikan secara proporsional sebesar 15% dari nilai sertifikat pembayaran dengan mengurangkan pada setiap tagihan yang dikeluarkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Perusahaan akan memotong sebesar 5% dari setiap pembayaran atas hasil pekerjaan dalam bentuk uang retensi dan akan ditahan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara Masa Pemeliharaan Tahap I Hasil Pekerjaan.

Pada tanggal 1 Juni 2016, terdapat Addendum 1 Kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Jalan Tol Solo- tanggal 1 Juni 2016. Nilai kontrak yang semula sebesar Rp1.048.521.000.000 menjadi Rp1.056.567.000.000 (termasuk Pajak Pertambahan Nilai).

e. Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Paket 1

Berdasarkan Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi-Kertosono Ruas Ngawi-Kertosono Paket 1 antara Perusahaan dengan Kerjasama Operasi ("KSO") PT Multi Phi Beta (Kerjasama Operasi antara PT Multi Phi Beta dan PT Indec Internusa) No. 01/SPP/NKJ/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, KSO PT Multi Phi Beta berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan konsultansi pengawas teknik jalan tol dengan nilai kontrak sebesar Rp20.556.591.000 (termasuk Pajak Pertambahan Nilai).

Pada tanggal 3 Desember 2015, Perusahaan telah memberikan uang muka kepada KSO PT Multi Phi Beta untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebesar 10% dari nilai kontrak (Rp2.055.659.000) dan akan dikembalikan secara proporsional sebesar 10% dari nilai sertifikat pembayaran dengan mengurangkan pada setiap tagihan yang dikeluarkan KSO PT Multi Phi Beta.

f. Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Paket 2

Berdasarkan Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi-Kertosono Ruas Ngawi-Kertosono Paket 2 antara Perusahaan dengan Kerjasama Operasi ("KSO") PT Buana Archicon (Kerjasama Operasi antara PT Buana Archicon, PT Mitrapacific Consulindo International, PT Mega Trustlink dan PT Seecons) No. 02/SPP/NKJ/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, KSO PT Buana Archicon berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan konsultansi pengawas teknik jalan tol dengan nilai kontrak sebesar Rp12.476.552.000 (termasuk Pajak Pertambahan Nilai).

Pada tanggal 3 Desember 2015, Perusahaan telah memberikan uang muka kepada KSO PT Buana Archicon untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebesar 10% dari nilai kontrak (Rp1.247.655.200) dan akan dikembalikan secara proporsional sebesar 10% dari nilai sertifikat pembayaran dengan mengurangkan pada setiap tagihan yang dikeluarkan KSO PT Buana Archicon.

g. Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Paket 3

Berdasarkan Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi-Kertosono Ruas Ngawi-Kertosono Paket 3 antara Perusahaan dengan Kerjasama Operasi ("KSO") PT Eskapindo Matra (Kerjasama Operasi antara PT Eskapindo Matra dan PT Dressa Cipta Rekayasa) No. 03/SPP/NKJ/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, KSO PT Multi Phi Beta berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan konsultansi pengawas teknik jalan tol dengan nilai kontrak sebesar Rp20.743.690.000 (termasuk Pajak Pertambahan Nilai).

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

21. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

g. Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Paket 3 (lanjutan)

Pada tanggal 3 Desember 2015, Perusahaan telah memberikan uang muka kepada KSO PT Multi Phi Beta untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebesar 10% dari nilai kontrak (Rp2.074.369.000) dan akan dikembalikan secara proporsional sebesar 10% dari nilai sertifikat pembayaran dengan mengurangkan pada setiap tagihan yang dikeluarkan KSO PT Multi Phi Beta.

h. Perjanjian Dana Talangan Tanah

Pada 18 April 2016, berdasarkan keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham Perusahaan:

- a) Memberikan persetujuan kepada direksi Perusahaan untuk mendapatkan Dana Talangan Tanah dengan nilai maksimal setinggi-tingginya sebesar Rp182.000.000.000 oleh pemegang saham Perusahaan yaitu:
 - PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar Rp109.200.000.000
 - PT Waskita Toll Road sebesar Rp72.800.000.000
- b) Memberikan persetujuan bahwa selisih nilai tambah antara Dana Talangan Tanah dengan pengembalian oleh pemerintah dan *cost of fund* yang timbul menjadi biaya Perusahaan yang diakui sebagai hutang kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road atau dikonversi menjadi tambahan saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road.
- c) Memberikan kewenangan pada direksi Perusahaan untuk mengembalikan Dana Talangan Tanah beserta nilai tambah kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk PT dan Waskita Toll Road selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterimanya dana dari pemerintah.

Pada 27 Mei 2016, Perusahaan dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Pendahuluan Pemberian Pinjaman Kepada Anak Perusahaan, di mana PT Jasa Marga (Persero) Tbk setuju untuk memberikan Dana Talangan Tanah kepada Perusahaan dalam rangka pengadaan tanah sejumlah Rp21.840.000.000. Atas pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan membayar Nilai Tambah kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar tingkat suku bunga pinjaman komersial yang berlaku di PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dihitung secara harian sejak tanggal penarikan dengan dasar pembagi tetap 360 hari.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Perusahaan pada tanggal 22 Agustus 2016, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan Dana Talangan Tanah yang semula sejumlah maksimum Rp182.000.000.000 menjadi sejumlah maksimum Rp343.204.000.000.

Pada 30 November 2016, Perusahaan dan PT Waskita Toll Road menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan Pengadaan Tanah Jalan Tol Ngawi-Kertosono Kepada Anak Perusahaan, di mana PT Waskita Toll Road setuju untuk memberikan Dana Talangan Tanah kepada Perusahaan dalam rangka pengadaan tanah sejumlah maksimum Rp137.281.600.000. Atas pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan membayar Nilai Tambah kepada PT Waskita Toll Road sebesar tingkat suku bunga pinjaman yang ditentukan dalam *offering letter* yang telah disetujui oleh Perusahaan, dihitung secara harian sejak tanggal penarikan dengan dasar pembagi tetap 360 hari.

Pada 28 Desember 2016, Perusahaan dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman Kepada PT Ngawi Kertosono Jaya, di mana PT Jasa Marga (Persero) Tbk setuju untuk memberikan Dana Talangan Tanah kepada Perusahaan dalam rangka pengadaan tanah sejumlah maksimum Rp205.922.400.000. Atas pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan membayar Nilai Tambah kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar tingkat suku bunga pinjaman komersial yang berlaku di PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dihitung secara harian sejak tanggal penarikan dengan dasar pembagi tetap 360 hari.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

22. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, yang juga sama dengan taksiran nilai wajar, dari instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan posisi keuangan:

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Aset Keuangan		
<u>Aset Keuangan Lancar</u>		
Kas dan setara kas	132.354.922.012	13.994.960.962
Piutang kepada pemerintah	152.912.677.893	-
Piutang dari pemegang saham	-	7.247.046.142
Aset lancar lainnya	174.385.128	139.259.690
Total aset keuangan lancar	<u>285.441.985.033</u>	<u>21.381.266.794</u>
<u>Aset Keuangan Tidak Lancar</u>		
Dana ditetapkan penggunaannya	38.319.462.100	38.319.462.100
Nilai Tambah Ditangguhkan	15.542.396	-
Total Aset Keuangan	<u>323.776.989.529</u>	<u>59.700.728.894</u>
	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Liabilitas Keuangan		
<u>Liabilitas Keuangan Jangka Pendek</u>		
Utang kontraktor & konsultan	77.200.526.105	-
Beban akrual	736.847.568.971	107.831.724.529
Utang kepada pemegang saham	208.740.089.307	-
Pinjaman jangka pendek	-	212.842.306.499
Total liabilitas keuangan jangka pendek	<u>1.022.788.184.383</u>	<u>320.674.031.028</u>
<u>Liabilitas Keuangan Jangka Panjang</u>		
Utang retensi	34.586.544.623	-
Utang bank	725.319.059.142	-
Total Liabilitas Keuangan	<u>1.782.693.788.148</u>	<u>320.674.031.028</u>

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang mana dapat digunakan untuk memperkirakan nilai tersebut:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek diasumsikan sama dengan nilai tercatatnya karena akan jatuh tempo dalam waktu singkat.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan Perusahaan mendekati nilai wajarnya.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

22. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Aset keuangan tidak lancar

Nilai wajar aset keuangan tidak lancar diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif berdasarkan tingkat suku bunga terakhir yang berlaku di pasar pada tanggal laporan posisi keuangan.

23. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN

Risiko relevan yang muncul dari kegiatan Perusahaan terkait dengan risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko suku bunga seperti diringkas di bawah ini:

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Perusahaan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank, yaitu hanya bank-bank ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Perusahaan menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan bank yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Risiko Suku Bunga

Perusahaan akan memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Perusahaan akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan pemberi pinjaman, atau mempertimbangkan strategi hedging suku bunga. Perusahaan tidak memiliki pinjaman dan aktivitas hedging tingkat bunga untuk mengantisipasi risiko tingkat suku bunga tersebut.

Manajemen Risiko Permodalan

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk menjaga kelangsungan usaha sehingga dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya, dan memelihara struktur permodalan yang optimum. Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbal hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

PT NGAWI KERTOSONO JAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah)

24. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

Informasi tambahan atas laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Perolehan Aset Takberwujud tahun berjalan	(1.532.633.402.129)	(126.816.565.460)
Penambahan Aset Takberwujud-non kas:		
Kenaikan biaya yang masih harus dibayar	629.015.844.442	-
Kenaikan utang kontraktor dan konsultan yang masih harus dibayar	77.200.526.115	105.665.528.775
Kenaikan utang retensi	34.586.544.623	-
Kenaikan utang kepada pihak berelasi yang masih harus dibayar	17.222.210.717	-
Marjin konstruksi	15.823.369.627	1.176.760.836
Penerimaan pinjaman KI IDC	12.752.744.228	-
Nilai tambah atas dana talangan	2.274.710.313	-
Biaya perolehan transaksi pinjaman bank	(8.042.107.465)	-
Kenaikan (penurunan) utang pajak Pasal 4(2)	(2.156.251.844)	8.265.663.759
Kas terpakai untuk perolehan Aset Takberwujud	(753.955.811.373)	(11.708.612.090)

25. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, para pemegang saham menyetujui untuk mengubah tempat kedudukan Perusahaan dari Jakarta Selatan menjadi Madiun, Jawa Timur. Perubahan kedudukan Perusahaan telah diaktakan oleh Aliah, SH sebagai Pengganti dari notaris Julius Purnawan, SH, MSI, dengan Akta No. 1 tanggal 3 Januari 2017 dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor : AHU-AH.01.03-0010487 tanggal 12 Januari 2017.

26. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh DSAK, tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan dibawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

- a) Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan. Amandemen ini mengklarifikasi, bukan mengubah secara signifikan, persyaratan PSAK 1, antara lain, mengklasifikasi mengenai materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

27. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2017.